

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas

1. Keadaan Kota Pekanbaru

a. Geografis

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai Ibukota Provinsi Riau. Sehingga dengan demikian Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi Provinsi Riau.

Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan luas sekitar 632.26 km² dan secara astronomis terletak di antara 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara dan 101° 14' – 101° 34' Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Di bagian utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak,
- Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar,
- Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 km². Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang

yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya.

b. Demografi

Panjang jalan dalam Kota Pekanbaru yaitu 2.463 kilometer, hampir 25 persennya dalam keadaan rusak, dengan penambahan jumlah penduduk Kota Pekanbaru maka dapat diperkirakan bahwa penambahan jumlah kendaraan juga akan sangat pesat. Di tambah dengan terpusatnya perkembangan kota yang utama disepanjang Jalan Jendral Sudirman maka sudah sangat terasa kesesakan lalu lintas kota.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas serta ketertiban dalam pengguna fasilitas umum seperti jalan dan kendaraan, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan yaitu Tampan, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Lima puluh, Sail, Pekanbaru Kota, Sukajadi, Senapelan, Rumbai, Payung Sekaki, Rumbai Pesisir, Tenayan Raya dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 kelurahan/desa.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

c. Fisiografi

Keadaan iklim Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 derajat celcius sampai dengan 35,6 derajat celcius dan suhu minimum antara 20,2 derajat celcius sampai dengan 23,0 derajat celcius. Curah hujan antara 38,6 sampai dengan 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar:

- Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
- Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus.

Visi Pembangunan Provinsi Riau

Visi jangka panjang pembangunan Provinsi Riau hingga tahun 2020 merupakan cerminan dari komitmen seluruh masyarakat Riau yang telah disepakati dan ditetapkan berdasarkan Perda Provinsi Riau Nomor 36 tahun 2001 tentang pola dasar pembangunan daerah Provinsi Riau 2001-2005, yakni:

“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin dikawasan Asia Tenggara tahun 2020”

Guna melanjutkan visi pembangunan Provinsi Riau diatas, maka disusunlah visi antara pembangunan jangka menengah lima tahun kedua oleh kepala daerah yang kemudian ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2009-2013, yaitu:

“Terwujudnya pembangunan ekonomi yang mapan dan pengembangan budaya Melayu secara profesional melalui kesiapan Infrastruktur dan peningkatan dalam masyarakat yang agamis”

Guna melanjutkan visi pembangunan Provinsi Riau diatas, maka disusunlah visi antara pembangunan jangka menengah lima tahun kedua oleh kepala daerah yang kemudian ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah (RPJMD).

Sebagai gambaran nyata dari penjabaran misi pembangunan Riau 2020, perlu adanya visi 5 tahun agar pada tiap tahap periode pembangunan jangka menengah tersebut dapat dicapai secara optimal. Sehingga dengan adanya pertimbangan terhadap tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskanlah visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2014-2019 sebagai berikut.

“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pematapan aparat”

Misi Pembangunan Provinsi Riau

Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Riau tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
4. Menurunkan Kemiskinan

5. Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemanapan Kehidupan Politik
6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa
7. Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan
8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata
9. Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan

Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di kota Pekanbaru. Seiring semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap di kota Pekanbaru, pemerintah kota pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendataan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik disektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk kota Pekanbaru tetap terjamin.

d. Sosial Budaya

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan sebagainya. Mata pencarian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 luas kota Pekanbaru dikembangkan dari 62,96 Km² dengan 8 Kecamatan, 36 Kelurahan dan 9 Desa. Pembagian ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Namun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 beberapa kecamatan di Pekanbaru

kembali di mekarkan. Kecamatan yang dimekarkan itu antara lain, Kecamatan Payung Sekaki yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Tampan, Kecamatan Tenayan Raya dan Marpoyan Damai yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rumbai. Adapun luas keseluruhan dari kota Pekanbaru mencapai 632,36 Km². Untuk mengetahui secara rinci luas dari pada masing-masing kecamatan di daerah Kota Pekanbaru ini maka dapat dilihat dari table berikut:

Tabel IV. 1: Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase %
1.	Pekanbaru kota	2,26	0,36 %
2.	Senapelan	6,65	1,05 %
3.	Sukajadi	5,10	0,81 %
4.	Limapuluh	4,04	0,64 %
5.	Sail	3,26	0,52 %
6.	Rumbai	105,23	16,64 %
7.	Rumbai Pesisir	96,75	15,30 %
8.	Bukit Raya	94,56	14,96 %
9.	Tenayan Raya	108,84	17,21 %
10.	Marpoyan Damai	89,86	14,21 %
11.	Tampan	63,08	9,98 %
12.	Payung Sekaki	52,63	8,32 %
Jumlah		632,26	100 %

Sumber: Kantor Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2017

Dari data diatas terlihat bahwa kecamatan terluas didaerah kota Pekanbaru adalah kecamatan Tenayan Raya dengan luas wilayah 108,84 Km², sedangkan wilayah kecamatan terkecil adalah kecamatan Pekanbaru Kota dengan luas wilayah 2,26 Km².

Dengan jumlah penduduk 799.213 jiwa, kota Pekanbaru yang cukup padat serta perkembangan yang sangat cepat maka diperlukan pendidikan untuk menggerakkan laju perkembangan tersebut. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan yang membicarakan disiplin

keilmuan formal tetapi didalam pendidikan terkandung muatan berbagai pemahaman yang esensial akan seluruh tata kehidupan manusia.

2. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Dinas Pekerjaan Umum dibentuk pada tahun 2004 berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2004. Pada awal pembentukan Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas 3 bidang yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Pengairan dan Bidang Cipta Karya. Pada Tahun 2005 terjadi perubahan SOTK berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2005 dimana Dinas Pekerjaan Umum berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan, yang terdiri dari 4 bidang yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Pengairan, Bidang Cipta Karya dan Bidang Perhubungan. Setelah itu, pada Tahun 2006 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan kembali dipecah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan.

Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Pekanbaru kembali melakukan perubahan SOTK berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2008, dimana Dinas Pekerjaan Umum dipecah menjadi 2 SKPD yaitu Dinas Bina Marga dan Pengairan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Pekanbaru merupakan organisasi pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten yang bergerak untuk melayani masyarakat dibidang ke-PU-an baik bidang pengairan, jalan, jembatan maupun pelayanan penyediaan alat-alat berat. Sedangkan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan melayani masyarakat dalam bidang pembangunan infrastruktur gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, sanitasi, taman kota serta prasarana dan sarana umum lainnya.

Pada tahun 2010 Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru kembali melakukan perubahan SOTK dimana beberapa SKPD yang dipecah kembali disatukan. Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2010, Dinas Bina Marga dan Pengairan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan kembali digabungkan menjadi Dinas Pekerjaan Umum sampai pada saat ini. Dinas Pekerjaan Umum membawahi 4 Bidang Teknis dan 2 UPTD yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Pengairan dan Bidang Pertamanan dan Kebersihan, serta UPT SPAM dan UPTD Alat Berat. Masing-masing UPT dikepalai oleh seorang Kepala UPTD setara eselon IV yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Misi dan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi:

Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur”.

Visi:

- Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur;
- Meningkatkan Pelayanan Pendidikan;
- Meningkatkan Pelayanan Kesehatan;
- Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik;
- Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa;
- Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan;
- Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata;
- Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan.

B. Struktur Organisasi



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

C. Fungsi dan Tugas Organisasi

Berdasarkan Peraturan walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru terdapat pada bab 2 tentang kedudukan dan bab 3 tentang susunan organisasi dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Secretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Pekanbaru terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Secretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
 - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air
 2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

- d. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Bina Marga
 - 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - 3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan
- e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Cipta Karya
 - 2. Seksi Pengembangan SPAM dan PLP
 - 3. Seksi Penataan Bangunan
- f. Bidang Jasa Konstruksi, membawahi :
 - 1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi
 - 2. Seksi Perberdayaan Jasa Konstruksi
 - 3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi
- g. Bidang Tata Ruang, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang
 - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang
 - 3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- h. Bidang Pertamanan, membawahi :
 - 1. Seksi Pertamanan dan Ornamen
 - 2. Seksi Pembibitan dan Penghijaun
 - 3. Seksi Pemeliharaan Pertamanan
- i. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.